

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Avila, Humberto, 2016, *Certainty in Law*, Springer International Publishing Switzerland.
- Darussalam, dkk, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Penerbit DDTC PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad., 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Greenberg, Scott, 2017, *Pass-Through Businesses: Data and Policy*, Tax Foundation, Washington DC.
- Kleinbard, Edward D, 2014, *We Are Better Than This: How Government Should Spend Our Money*, Oxford, Oxford University Press.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Infanti, Anthony C, *Our Service Tax Laws Toward Tax Reform that Mirror Our Better Selves*, The MIT Press, Cambridge.
- Lyon, Andrew, dkk, *Corporate and Pass-Through Business State Income Tax Burdens: Comparing State-Level Income and Effective Tax Rates*, 2017, State Tax Research Institute (STRI), Washington DC.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ritonga, Anshari, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Pustaka El Manar, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta.

Thuronyi, Victor, dkk, 1998, *Tax Law Design and Drafting Volume 2*, International Monetary Fund Publication, Washington DC.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Cooper, Michael, dkk, "Business in the United States: Who Owns It, and How Much Tax Do They Pay?", *Chicago Journal*, Vol. 30, No. 1, 2016.

DeBacker, Jason, dkk, "The Impact of State Taxes on Pass-Through Businesses: Evidence From the 2012 Kansas Income Tax Reform", *Journal of Public Economics*, Vol 174, May 2019.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Mulyo, Budi Sih, 2015, "Analisis Kewajiban Perpajakan Bentuk Usaha Kerja Sama Operasi Berdasarkan PSAK No 39 dan PSAK No 12", skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.

D. Internet

Congressional Research Service, "A Brief Overview of Business Types and Their Tax Treatment", <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43104.pdf>, diakses 5 Agustus 2020.

Digital Media Law Project, "Double Taxation", <https://www.dmlp.org/legal-guide/double-taxation>, diakses 5 Juli 2021.

Freeman Law, "Fiscally Transparent Entities", <https://freemanlaw.com/fiscally-transparent-entities/>, diakses 18 November 2021.

Internal Revenue Service, "Forming a Corporation", <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/forming-a-corporation>, diakses 5 Juli 2021.

Hukum Online, "*Literia Legis* dan *Sintetia Legis*: Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f19c5d9a2/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum/?page=2>, diakses 17 Oktober 2021.

Internal Revenue Service, "Tax Information for Partnership", <https://www.irs.gov/businesses/partnerships>, diakses 7 Februari 2021.

Kementerian Keuangan, "Skema Bagi Hasil Pada Kerja Sama Usaha dan Pemanfaatan Barang Milik Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html, diakses 11 September 2021.

Laurence, Bethany K, “How Partnerships Are Taxed”, *<https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/how-partnerships-are-taxed-29710.html>*, diakses 10 September 2021.

Online Pajak, “Apa itu *Joint Operation*?”, *<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/joint-operation>*, diakses 8 Agustus 2021.

Tambunan, Ruston, “Ketidakpastian Atas Perlakuan Perpajakan Joint Operation (JO) Dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi”, *<https://www.citasco.com/ketidakpastian-atas-perlakuan-perpajakan-joint-operation-jo-dalam-bidang-usaha-jasa-konstruksi/>*, diakses 22 Juni 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 50/PRT/1991 Tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 646).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Penganaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ.2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 Tentang Masalah Perpajakan Bagi Joint Operation.
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 Tanggal 6 Desember 1989 Tentang Masalah Perpajakan Bagi *Joint Operation*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/1994 Tentang Pemecahan Bukti Pemotongan PPh 23.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-251/PJ.313/1999.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-823/PJ.312/2002 Tentang Permohonan Penjelasan Tentang Perpajakan Dalam Hal *Joint Operation*.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dan Penentuan Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

F. Lain-lain

Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi Perkara Pailit Nomor: 01 K/N/1999.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 42/Pailit/PN/Niaga Jakarta Pusat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 66: Pengaturan Bersama.

United States Code.